

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah dan reformasi keuangan yang telah dilakukan mulai awal tahun 2000 telah menghasilkan perubahan iklim pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi bahasan yang menarik kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah, walaupun dalam prakteknya masih lemah. Terutama untuk pemerintah daerah, laporan keuangan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menilai kinerja sebuah pemerintah daerah. Salah satu bentuk usaha memulihkan kondisi pemerintahan dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*, pemerintah selaku organisasi sektor publik dituntut untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Berdasarkan Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengeambilan keputusan. Agar informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para pengguna nya maka sebuah informasi harus dapat memenuhi kualitas tertentu. Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yaitu Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Namun setelah diberlakukannya paket undang-undang tersebut, hampir belum ada kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara maupun Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam 3 tahun terakhir ini secara umum menunjukkan kualitas yang masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data dari IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) yang

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

dikeluarkan BPK untuk semester satu tahun 2012, berikut ini perkembangan opini LKPD tahun 2006-2011.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2011

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	6%	341	66%	26	5%	119	23%	520
2011	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426

Sumber : IHPS I Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang perkembangan opini LKPD Tahun 2006-2011, persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2011 adalah sebanyak 16%, meningkat 10% dari Tahun 2010 sebanyak 6%. Persentase LKPD yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun 2011 adalah sebanyak 74% meningkat 8% dari Tahun 2010 sebanyak 66%. Persentase LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) pada Tahun 2011 adalah sebanyak 1%, turun 4% dari Tahun 2010 sebanyak 5%. Persentase LKPD yang memperoleh opini Tidak Memberi Pendapat (TMP)/ *disclaimer* pada Tahun 2011 adalah sebanyak 9% turun 14% dari Tahun 2010 sebanyak 23%.

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

Tabel 1.2
Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

No	Kelompok temuan kasus	Jumlah kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.791
2	Kelemahan sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.739
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	839
Jumlah		4.369

Sumber : IHPS I Tahun 2012

Jika dilihat pada tabel 1.2 tentang Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan. Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI diantaranya yaitu ada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu Sebanyak 1.791 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri dari: 1.005 kasus pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat, sebanyak 603 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, sebanyak 13 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan, sebanyak 147 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan sebanyak 23 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

Sedangkan pada Pemerintah Kota Bandung dijelaskan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 terdapat temuan kasus kelemahan sistem pengendalian intern atas pemeriksaan keuangan dapat dilihat pada tabel 1.3:

Tabel 1.3
Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan di Kota Bandung

No	Kelompok temuan kasus	Jumlah kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2
2	Kelemahan sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	3
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1
Jumlah		6

Sumber : IHPS I Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1.3 tentang kelompok temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan di Kota Bandung. Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang salah satunya pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. BPK masih menemukan kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu kelemahan pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Temuan –temuan ini akan berdampak pada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak auditor. Tujuan dari

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

pemeriksaan tersebut untuk menilai kewajaran atas informasi yang disajikan atas laporan keuangan. Opini yang dikeluarkan oleh pihak auditor merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan, dari opini tersebut akan menggambarkan kualitas laporan keuangan suatu entitas.

Temuan kasus-kasus pada Pemerintah Kota Bandung dijelaskan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 dimana terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat dilihat pada tabel 1.4 :

Tabel 1.4
Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan di Kota Bandung

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan</i>		
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	8
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	-
3	Kekurangan Penerimaan	1
Sub Total 1		9
4	Administrasi	6
5	Ketidakhematan	-
6	Ketidakefisienan	-
7	Ketidakefektifan	3

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

Sub Total 2	9
Total	18

Sumber : IHPS I Tahun 2012

Berdasarkan tabel 1.4 kelompok temuan ketidakpatuhan atas pemeriksaan keuangan di Kota Bandung ini dapat menimbulkan kerugian Negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi dan ketidakefektifan. Beberapa temuan tersebut nantinya akan mempengaruhi opini LKPD dan mempunyai dampak material terhadap penyajian kewajaran laporan keuangan yang menggambarkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada serta opini yang diraih oleh kota Bandung tiga tahun terakhir ini terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung secara umum menunjukkan kualitas yang masih jauh dari harapan. Dilihat sampai dengan tahun 2011 Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini artinya secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan dengan benar kecuali untuk aspek tertentu dari laporan keuangan. Dan temuan ini berulang tiap tahun terjadi, ini mencerminkan kelambanan pemerintah dalam memperbaiki administrasi keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu tepat waktu. Selain itu juga dijelaskan masih ada kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan terkait dengan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

Beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap rendahnya kualitas Laporan Keuangan dikarenakan pemerintah daerah masih belum melakukan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangannya dengan baik, maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan yang berkompeten di bidang keuangan.

Rensis Likert dalam Arfan Ikhsan (2010:499) *menegaskan bahwa setiap aspek dari aktivitas suatu perusahaan/organisasi ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan, motivasi dan efektivitas umum dari organisasi manusianya.* Hal ini diperjelas oleh Elvyra Zeyn (2011), dengan terciptanya pemerintahan yang bersih (*good governance*) akan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh kompetensi pegawai disertai dengan komitmen organisasi yang tinggi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan Studi Davis dalam Arfan Ikhsan (2010:144), mengatakan dalam bidang sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi ‘.....*khususnya pengalaman dan pengetahuan menunjukkan peluang riset saat ini.*’

Beberapa riset seputar kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) masih menarik dan banyak diteliti diantaranya Asep Sudrajat Hardipradja

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

(2009), Devi Roviyantie (2008), M.Nuryanto dan Nunuy dalam tulisannya meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel kompetensi, Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ada pengaruh positif kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu juga, Penelitian lainnya yang meneliti kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel yang berbeda juga dilakukan oleh Elvyra Zeyn (2011), Ifa Ratifah dan M.Ridwan (2012) dalam tulisannya meneliti kualitas laporan keuangan dengan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa riset sebelumnya (Elvyra Zeyn (2011);Ifa Ratifah dan M.Ridwan (2012) menggunakan variabel komitmen organisasi hanya sebagai variabel pemoderasi. Maka dari itu, yang membedakan dengan peneliti sebelumnya yaitu penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian tersebut dengan mengambil variabel kompetensi pegawai dan variabel komitmen organisasi sebagai variabel bebas atau Independent Variabel (X) untuk diteliti pengaruhnya pada kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung.

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dari berbagai fenomena yang ada, yang telah dipaparkan dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kota Bandung
2. Bagaimana Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kota Bandung
3. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi pegawai dan komitmen organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui :

1. Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung
2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung
3. Pengaruh kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kota Bandung sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta masukan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi, khususnya mengenai akuntansi sektor publik.



Ika Famela Kurnia, 2013

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu